

BAB II

DINAMIKA POLITIK DI PARAGUAY

Paraguay adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan dengan Asuncion sebagai ibukotanya. Paraguay adalah negara yang dihimpit daratan disekelilingnya. Paraguay memiliki perbatasan langsung dengan negara disekitarnya, hal ini membuat hubungan diplomatik antar negara di sekitar Paraguay menjadi hal yang wajar. Paraguay juga melakukan kerjasama yang kuat dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang. Kerjasama ini dimulai sejak dijabatnya Alfredo Stroessner sebagai presiden Paraguay. Hubungan kedua negara ini Semakin kuat sejak mantan presiden Horacio Cartes mengikuti langkah Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Jerusalem. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dinamika politik domesik dan luar negeri dari negara Paraguay sejak diberlakukannya sistem pemerintahan demokrasi hingga keputusan presiden Paraguay terkini, Mario Abdo Benitez, yang tidak sejalan dengan keputusan Amerika Serikat. (Indonesia, 2019)

Konsep Demokrasi dapat ditelusuri ke orang-orang Yunani kuno dan khususnya negara-kota Athena pada abad kelima SM. Kata demokrasi berasal dari kata Yunani 'demo', yang berarti orang, dan 'Kratos' yang berarti kekuasaan atau kekuasaan. Diterjemahkan secara langsung, oleh karena itu demokrasi berarti 'pemerintahan oleh rakyat', meskipun pada awalnya orang Yunani menggunakannya untuk orang miskin atau massa. Periclean Athens, dinamai sesuai dengan pemimpinnya yang paling terkenal, telah menginspirasi generasi ahli teori politik, negarawan, dan orang-orang biasa di kemudian hari. Namun banyak aspek demokrasi Athena

tampak aneh dan asing bagi mata modern. Lembaga politik pusat di Athena selama abad keenam dan kelima SM. adalah Majelis, biasanya terdiri dari 5.000 hingga 6.000 anggota dan terbuka untuk semua warga negara dewasa kecuali perempuan, budak, dan orang asing. Dengan suara mayoritas sederhana, Majelis dapat memutuskan hampir semua masalah domestik tanpa batasan hukum. Yang paling luar biasa, mungkin, adalah kenyataan bahwa para pemimpin Majelis Athena tidak dipilih, tetapi dipilih secara lot, karena orang-orang Athena percaya bahwa setiap warga negara mampu memegang jabatan publik.

Di bawah ini adalah beberapa makna yang telah dikaitkan dengan konsep demokrasi:

1. Sistem aturan oleh orang miskin dan yang kurang beruntung;
2. Suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus menerus, tanpa perlu politisi profesional atau pejabat publik;
3. Masyarakat yang didasarkan pada kesempatan yang sama dan prestasi individu, bukan hierarki atau hak istimewa;
4. Sistem kesejahteraan dan redistribusi yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan sosial; Suatu sistem pengambilan keputusan berdasarkan prinsip aturan mayoritas;
5. Suatu sistem pengambilan keputusan berdasarkan prinsip aturan mayoritas;
6. Suatu sistem aturan yang melindungi hak dan kepentingan minoritas dengan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan mayoritas;
7. Cara mengisi kantor publik melalui perjuangan kompetitif untuk pemilihan umum;

8. Suatu sistem pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat tanpa memandang partisipasinya dalam jabatan politik.

Definisi yang berfungsi untuk demokrasi dalam makalah ini adalah 'suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab sipil dijalankan oleh semua warga negara dewasa, secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang mereka pilih secara bebas'.

Demokrasi lebih dari sekadar seperangkat institusi pemerintah tertentu; ia bertumpu pada sekelompok nilai, sikap, dan praktik yang dipahami dengan baik - yang semuanya dapat mengambil bentuk dan ekspresi yang berbeda di antara budaya dan masyarakat yang berbeda di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa karakteristik inti demokrasi:

1. Demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab sipil dijalankan oleh semua warga negara dewasa secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan mereka yang dipilih secara bebas.
2. Demokrasi bertumpu pada prinsip kekuasaan mayoritas, yang berarti bahwa keputusan dibuat oleh mayoritas dan harus diterima oleh semua orang, tetapi sudut pandang minoritas dihormati dan dilindungi.
3. Demokrasi menjaga terhadap pemerintah pusat yang sangat kuat dan mendesentralisasi pemerintah ke tingkat regional dan lokal, memahami bahwa semua tingkat pemerintahan harus dapat diakses dan responsif kepada masyarakat sebanyak mungkin.
4. Demokrasi memahami bahwa salah satu fungsi utamanya adalah untuk melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara dan beragama; hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum; dan kesempatan untuk mengatur dan berpartisipasi

sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

5. Demokrasi melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil secara teratur yang terbuka untuk semua warga negara yang memiliki usia pemilih.
6. Warga negara dalam demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang, pada gilirannya, melindungi hak dan kebebasan mereka.
7. Masyarakat demokratis berkomitmen pada nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan kompromi.

Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung / partisipatif dan representatif.

Dalam demokrasi langsung, warga negara, tanpa perantara pejabat terpilih atau yang ditunjuk, dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan publik. Demokrasi langsung dengan demikian mengurangi perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah dan antara negara dan masyarakat sipil; ini adalah sistem pemerintahan mandiri yang populer. Manifestasinya yang paling umum di era modern adalah penggunaan referendum.⁵ Di Uganda, praktik demokrasi langsung dapat ditemukan di tingkat dewan lokal 1 (desa) dan selama referendum nasional, seperti yang terjadi pada 2005 ketika referendum dilaksanakan. diadakan untuk berubah dari sistem Gerakan ke dispensasi multipartai. Demokrasi langsung paling jelas dipraktikkan dengan jumlah orang yang relatif sedikit - dalam organisasi masyarakat, dewan suku, atau unit lokal dari serikat pekerja, misalnya - di mana anggota dapat bertemu di satu ruangan untuk membahas masalah dan sampai pada keputusan dengan konsensus atau suara mayoritas.

Namun, hari ini, seperti di masa lalu, bentuk demokrasi yang paling umum, baik untuk kota

berpenduduk 50.000 atau 50 juta orang, adalah demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih pejabat untuk membuat keputusan politik, merumuskan undang-undang, dan mengelola program untuk kepentingan umum. Jenis demokrasi ini terbatas dan tidak langsung. Terbatas dalam arti bahwa partisipasi rakyat dalam pemerintahan jarang dan singkat, dibatasi pada tindakan memilih setiap beberapa tahun. Ini tidak langsung karena publik tidak menggunakan kekuasaan sendiri; mereka hanya memilih orang-orang yang akan memerintah atas nama mereka. Bentuk aturan ini hanya demokratis sejauh perwakilan membentuk hubungan yang andal dan efektif antara pemerintah dan yang diperintah.

Di Uganda, misalnya, pasal 1 (1) Konstitusi Uganda menyatakan bahwa 'semua kekuasaan adalah milik orang-orang yang akan menjalankan kedaulatan mereka sesuai dengan konstitusi'; Ayat (4) menyatakan bahwa people orang-orang harus menyatakan keinginan dan persetujuan mereka tentang siapa yang akan mengatur mereka dan bagaimana mereka harus diatur, melalui pemilihan perwakilan mereka secara teratur, bebas dan adil atau melalui referensi'.

Ini kadang-kadang disebut sebagai pilar, prinsip, atau prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Mereka membedakan pemerintahan demokratis dari jenis pemerintahan lainnya. Setiap demokrasi di seluruh dunia dapat dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip ini. Mereka termasuk:

1. Partisipasi warga negara: Ini berarti bahwa warga negara adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang terjadi di masyarakat atau negara mereka. Warga negara adalah bagian dari proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka. Komunikasi adalah proses konsultatif dua

arah, yaitu bottom-up serta top-bottom sebelum keputusan diambil.

2. Kesetaraan: Ini berarti kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan kesempatan dalam realisasi kapasitas individu tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, latar belakang etnis, agama atau apa pun.
3. Toleransi politik: Ini berarti massa yang berkuasa penuh perhatian dan menghormati kepentingan minoritas. Walaupun mungkin ada perbedaan antara orang-orang dengan cara ras, agama, keturunan dan budaya mereka naik di atas perbedaan tersebut dan memberikan ruang untuk diskusi, debat dan akomodasi dari berbagai sudut pandang.
4. Akuntabilitas: Ini terjadi ketika pemimpin atau pejabat publik yang terpilih harus menjawab kepada warga negara biasa mengenai tindakan, keputusan, atau keragu-raguan mereka selama mereka berada atau merupakan penghuni kantor publik. Mereka yang terbukti memenuhi standar yang disyaratkan dihadiahi oleh mereka yang tetap tinggal di kantor sementara mereka yang ditemukan kurang dalam satu atau lain cara dihukum.
5. Transparansi: Menjadi transparan berarti bahwa para pemimpin memungkinkan pengawasan publik atas apa yang mereka lakukan saat berada di kantor publik. Warga negara diizinkan untuk menghadiri pertemuan publik dan bebas untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di kantor publik, siapa yang membuat keputusan apa dan mengapa. Transparansi adalah langkah menuju akuntabilitas.
6. Pemilihan umum yang teratur, bebas dan adil: Pemilu yang teratur memastikan bahwa warga negara tidak terjebak dengan kepemimpinan yang buruk tetapi mereka memiliki kesempatan untuk mengusir para pemimpin yang tidak kompeten melalui pemilihan yang bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil memberikan warga negara

kesempatan untuk memilih seorang pemimpin pilihan mereka sebagai lawan kecurangan pemilihan yang sering mengembalikan pemimpin yang tidak diinginkan berkuasa. Pemilu adalah jalan utama bagi semua warga negara untuk menggunakan kekuasaan dengan memilih pemimpin mereka dan memberikan suara mereka kepada kandidat yang mereka pikir akan mewakili mereka yang terbaik.

7. Kebebasan ekonomi: Warga yang cacat secara ekonomi adalah mereka yang rentan terhadap semua jenis pelanggaran karena mereka tidak memiliki basis ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Akibatnya, merekalah yang sering disuap dengan hadiah terkecil selama pemilihan umum, yang konsekuensinya sering kali merugikan, seperti mengembalikan pemimpin yang korup dan secara moral bangkrut ke tampuk kekuasaan. Kemandirian ekonomi menciptakan fondasi di mana warga menjadi bersemangat dan dengan demikian dapat memanggil para pemimpin mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau tidak bertindak mereka. Dalam demokrasi, pluralisme ekonomi harus berjalan seiring dengan pluralisme politik dan sosial, yaitu kebebasan untuk memilih / memilih pemimpin politik seseorang dan kebebasan untuk menjadi anggota asosiasi sosial / budaya masing-masing.
8. Kontrol penyalahgunaan kekuasaan: Setiap pemerintah tanpa pemeriksaan dan keseimbangan kekuatannya cenderung menyalahgunakan kekuatan itu. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling umum adalah korupsi oleh pejabat pemerintah. Kontrol penyalahgunaan kekuasaan dapat dicapai melalui sejumlah cara, yaitu dengan cara memisahkan kekuasaan dari tiga tangan pemerintah - legislatif, eksekutif dan Kehakiman - dan dengan memastikan independensi ketiganya. Cara lain

adalah dengan menciptakan lembaga-lembaga seperti ombudsman pemerintah (Inspektur Pemerintah dalam kasus Uganda), yang mengawasi kinerja pejabat pemerintah terkait dengan standar dan etika yang disepakati.

9. Bill of rights: Ini memberlakukan kontrol pada kekuasaan pemerintah dalam upaya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan oleh para pemimpin yang bertanggung berat. Dengan demikian, RUU hak berupaya untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara dengan cara memastikan bahwa perlindungan ini diabadikan dalam konstitusi negara tertentu.
10. Budaya menerima hasil pemilihan umum: Setelah pemilihan yang bebas dan adil diadakan dan seorang pemenang dengan jelas muncul, yang kalah dalam pemilihan harus tanpa perlawanan mengungsi dari kantor dan menyerahkan instrumen kekuasaan kepada pemenang. Namun, penting juga bahwa setelah memberikan suara ke kekuasaan, para pemimpin harus memerintah untuk kepentingan semua warga negara terlepas dari kenyataan bahwa beberapa tidak memilih mereka.
11. Hak asasi manusia: Tidak seperti kediktatoran, demokrasi berusaha melindungi hak dan kebebasan warganya dari penyalahgunaan. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk memiliki properti, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berserikat, dan kebebasan untuk berkumpul, antara lain.
12. Sistem multi-partai: Sistem multi-partai adalah pengaturan di mana terdapat lebih dari dua partai politik yang bertarung untuk mendapatkan kekuasaan. Alasan untuk memiliki banyak partai dalam suatu demokrasi adalah: untuk memperluas kelompok untuk pemilihan kandidat terbaik untuk jabatan politik; untuk menawarkan pandangan

alternatif kepada pemerintah saat itu sebagai hasil dari adanya oposisi; dan untuk memungkinkan oposisi bertindak sebagai pengecekan terhadap mereka yang berada di kantor politik. Sistem satu partai menyebabkan kurangnya alternatif bagi warga negara dan konsentrasi kekuasaan dan sering menyebabkan kediktatoran.

13. Netralitas lembaga negara: Lembaga negara seperti polisi dan tentara harus netral dan tidak memihak atau berpihak secara politik.
14. Rule of law: Ini menyiratkan bahwa tidak ada yang di atas hukum dan mengharuskan semua warga negara mematuhi hukum dan bertanggung jawab jika mereka melanggar hukum. Proses hukum yang berlaku mengharuskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, adil dan konsisten. Negara hukum menjamin hukum dan ketertiban dan perlindungan warga negara saat mereka menikmati hak-hak mereka.

Keberhasilan demokrasi di suatu negara tergantung pada memiliki institusi yang kuat. Lembaga-lembaga ini termasuk tiga tangan pemerintah: Badan Legislatif (Majelis, Parlemen), Eksekutif dan Peradilan.

Sidang dihormati karena mereka terdiri dari politisi awam yang mewakili rakyat dan bukan oleh pejabat publik yang terlatih. Sidang diinvestasikan dengan kekuatan pembuat hukum formal, dengan demikian nama legislator. Assemblies menyediakan hubungan antara pemerintah dan rakyat, saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintah dan membantu menegakkan rezim dan memaksa pemerintah untuk menanggapi tuntutan dan kecemasan publik. Fungsi utama majelis adalah:

1. Legislasi: Sebagai wakil rakyat, para pembuat undang-undang diberi hak dengan kekuatan untuk membuat undang-undang atas nama warga negara.

Ini membuat hukum mengikat karena legislator menjalankan fungsi ini atas nama rakyat, artinya orang-orang itu sendiri yang membuat hukum mereka. Itu di parlemen bahwa diskusi dan debat tentang hukum yang diusulkan terjadi.

2. Representasi: Seperti disebutkan di atas, majelis memainkan peran representatif menyediakan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Karena kita tidak bisa semua duduk di parlemen, anggota parlemen yang dipilih dengan demikian melayani fungsi yang didelegasikan.
3. Pengawasan dan pengawasan: Penekanan lebih besar diberikan pada kemampuan majelis untuk membatasi atau memeriksa kekuasaan pemerintah. Ini adalah apa membuat majelis memeriksa tubuh yang fungsi utamanya adalah untuk memberikan pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel. Karena alasan yang sama konsep checks and balances digunakan ketika melihat ketiga lengan pemerintah, terutama parlemen yang harus meneliti dan mengawasi kegiatan eksekutif dan kehakiman.
4. Perekrutan dan pelatihan: Majelis sering bertindak sebagai saluran utama rekrutmen, menyediakan kumpulan bakat dari mana pembuat keputusan terkemuka muncul. Parlemen adalah tempat pelatihan karena itu adalah tempat perwakilan orang awam memperoleh keterampilan oratoris dan belajar caranya untuk berdebat dan membuat undang-undang, fungsi yang membangun kapasitas mereka untuk mengisi yang lain kantor politik.
5. Legitimasi: Majelis mempromosikan fungsi ini dengan mendorong masyarakat untuk percaya bahwa sistem aturan di atas mereka adalah sah. Itu sama saja alasan bahwa bahkan rezim otoriter mentolerir majelis.

Cabang eksekutif pemerintah dibebankan fungsi untuk mengimplementasikan atau melaksanakan hukum. Ini adalah inti pemerintahan, sebagaimana dicatat oleh Heywood, karena sistem politik dapat beroperasi tanpa konstitusi, majelis, peradilan dan bahkan partai, tetapi mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa cabang eksekutif untuk merumuskan kebijakan dan memastikan bahwa itu diterapkan. Eksekutif adalah sumber kepemimpinan politik.

Dalam arti luas, eksekutif adalah cabang pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh legislatif. Cabang eksekutif meluas dari kepala pemerintahan ke anggota lembaga penegak seperti polisi dan militer dan mencakup menteri dan pegawai negeri. Lebih umum, istilah ini digunakan dalam arti sempit untuk menggambarkan badan pembuat keputusan yang lebih kecil yang mengambil tanggung jawab keseluruhan untuk pengarahan dan koordinasi kebijakan pemerintah.

Selain fungsi utama memberikan kepemimpinan di tingkat tertinggi negara, berikut ini adalah fungsi lain dari eksekutif:

1. Tugas upacara: Kepala negara, kepala eksekutif dan, pada tingkat lebih rendah, menteri senior atau sekretaris mewakili negara. Peran yang dilakukan oleh para pemimpin eksekutif ini seringkali formal dan seremonial karena mereka dapat ditugaskan untuk mewakili pemerintah mereka pada acara-acara kenegaraan, konferensi internasional dan ratifikasi perjanjian dan dalam kunjungan asing.
2. Kontrol pembuatan kebijakan: Fungsi utama eksekutif politik, sebagaimana disebutkan di atas, adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan proses kebijakan dan implementasi kebijakan.

3. Kepemimpinan politik populer: Popularitas eksekutif politik, lebih dari bagian manapun dari sistem politik, sangat penting untuk karakter dan stabilitas rezim. Peran eksekutif politik adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan proses kebijakan. Eksekutif politik berupaya, khususnya, untuk mengembangkan program ekonomi dan sosial yang koheren yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks dan canggih secara politik, dan untuk mengendalikan berbagai hubungan eksternal negara di dunia yang semakin saling tergantung. Pada tingkat kebijakan, adalah kemampuan eksekutif untuk memobilisasi dukungan yang memastikan kepatuhan dan kerja sama masyarakat umum. Tanpa dukungan dari publik, atau dari kelompok-kelompok kunci lainnya dalam masyarakat, implementasi kebijakan menjadi sulit atau tidak mungkin.
4. Manajemen birokrasi: Tugas mengawasi implementasi kebijakan berarti bahwa eksekutif politik memiliki tanggung jawab birokrasi dan administrasi utama. Dalam hal ini, kepala eksekutif, menteri dan sekretaris membentuk manajemen puncak yang ditugasi menjalankan mesin pemerintahan.
5. Respon krisis: Keuntungan terbesar yang dimiliki eksekutif politik dibandingkan dua tangan pemerintah lainnya adalah kemampuannya untuk mengambil tindakan cepat dan tegas. Ketika krisis pecah dalam politik domestik atau internasional, eksekutif politiklah yang beraksi berdasarkan struktur hierarkisnya dan ruang lingkup yang disediakan untuk kepemimpinan pribadi. Karena alasan inilah majelis memungkinkan eksekutif politik mendekati kekuasaan diktator pada saat perang, dan bagi eksekutif untuk merebut kekuasaan darurat ketika dihadapkan dengan krisis domestik seperti

bencana alam, ancaman teroris, kerusuhan industri dan gangguan sipil.

Bagian ketiga dari pemerintahan adalah Peradilan yang diberdayakan untuk memutuskan perselisihan hukum. Fungsi utama para hakim adalah mengadili makna hukum, dalam arti bahwa mereka menafsirkan atau membangun hukum. Fungsi ini muncul karena pembuat hukum, yaitu para pembuat undang-undang sangat sering meletakkan orang sebagai masalah hukum. Di negara-negara dengan konstitusi tertulis / dikodifikasi, fungsi hakim juga melibatkan interpretasi konstitusi itu sendiri dan ini memungkinkan hakim untuk menengahi dalam perselisihan antara lembaga-lembaga utama pemerintah atau dalam perselisihan antara negara dan individu.

Salah satu karakteristik utama peradilan dalam sistem demokrasi liberal adalah bahwa hakim adalah aktor yang independen dan non-politik. Namun, hal ini tetap menjadi masalah yang sangat kontroversial dan dapat diperdebatkan di banyak negara di mana keterlibatan hakim dalam hal-hal yang menyangkut masalah politik. Untuk memastikan ketidakberpihakan putusan pengadilan, hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki jaminan pekerjaan atau masa kerja yang dijamin oleh hukum, sehingga mereka dapat membuat keputusan tanpa khawatir atas tekanan atau serangan oleh mereka yang memegang jabatan berwenang.

Institusi dan aktor demokratis lainnya termasuk media, masyarakat sipil, partai politik dan, terutama, oposisi kuat di parlemen.

A. Sistem Pemerintahan dan Dinamika Politik Dalam Negeri Paraguay

Paraguay merupakan sebuah negara demokrasi republik dengan sistem pemerintah negara kesatuan. Paraguay memiliki ibu kota yang bernama Asunción dan memiliki 17 propinsi yang disebut dengan departemen. Cabang pemerintahan tertinggi ialah Presiden sebagai lembaga eksekutif dan juga sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Paraguay. Lembaga legislatif terdiri dari dua kamar yaitu senator dan dewan perwakilan rakyat. Sistem yudikatif di Paraguay terdiri dari Mahkamah Agung, Dewan Kehakiman, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi untuk Naik Banding.

Dari bahasa Guarani Paraguay, nama Paraguay terdiri dari dua kata. Kata tersebut adalah 'para', dan 'guay'. Menurut para sejarawan, 'para' berarti air sedangkan 'guay' berarti kelahiran. Oleh karena itu, Paraguay berarti 'air yang melahirkan Samudra' atau 'lahir dari air'. Sarjana lain berpendapat bahwa 'para' mengacu pada sungai besar, sedangkan 'y' mengacu pada air. Tiga terjemahan ini menghasilkan 'air dari sungai yang besar'. Feliz de Azara (1746 - 1821), yang merupakan seorang ilmuwan dan perwira Spanyol datang dengan dua saran tentang apa yang akan menjadi asal nama Paraguay. Saran pertama Feliz adalah 'air dari Payaguas'. Payaguas adalah nama suku Indian yang tinggal di sepanjang sungai. Saran kedua adalah 'Paraguaio' yang merupakan pemimpin yang kuat pada masa itu. (Sawe, 2017)

Pada saat proses pendiriannya, Spanyol bekerjasama atau bermitra dengan suku asli setempat untuk membangun sebuah "Provinsi Raksasa Suku Indian" yang kemudian menjadi awal dari penjajahan Spanyol, yang salah satu caranya dilakukan lewat penyebaran agama

oleh penganut agama yang disebut "Jesuista" untuk menyebarluaskan ajaran agama Kristen ke seluruh daratan Paraguay serta membangun sebuah gereja Katoliknya yang pertama di Amerika Selatan, maka dari itu tidak mengherankan apabila salah satu obyek pariwisata terpenting di Paraguay sampai saat ini adalah rangkaian reruntuhan bangunan dan gereja peninggalan penyebar agama Kristen Katolik yang disebut *Misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná* yang pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1993. (Indonesia, 2019)

Paraguay merupakan negara yang memiliki jumlah populasi paling homogen dari negara Amerika Selatan yang lain. Sebagian besar penduduk hampir semuanya adalah mestizo (keturunan campuran Eropa dan suku Indian). Sekitar 300.000 orang Brasil yang mayoritasnya adalah seorang petani bermigrasi ke arah timur pada tahun 1970-an karena tanah di Paraguay lebih murah daripada di Brasil. Imigran lainnya datang dari Eropa barat, khususnya Jerman, Italia, dan Spanyol. Tidak sedikit juga imigran asal Asia yang berasal dari negara Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Ada sekitar 30.000 Mennonit berbahasa Jerman di Paraguay, sekitar setengahnya tinggal di koloni di Chaco. Orang suku Indian membentuk sekitar 2 persen dari populasi Paraguay. Kelompok etnis yang berbeda termasuk *Pai-Tavyterá*, *Mbyá*, *Aché*, dan *Chiripá* di timur dan *Toba*, *Maskoy*, *Lengua*, *Nivaklé*, *Tapieté*, *Ayoreo*, dan *Chamacoco* di Chaco. (Indonesia, 2019)

Pendapatan Domestik Bruto (GDP) Paraguay pada tahun 2015 mencapai USD 27,62 miliar (World Bank) dan GDP per kapita USD 4.160,60 (2015 - nomor 100 di dunia (World Bank) merupakan potensi bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan terutama di bidang ekonomi. Untuk menghadapi

tantangan ekonomi, pemerintah telah menyiapkan Plan Pembangunan Nasional yang pertama untuk periode 2014 – 2030 yang terdiri dari 3 pilar yaitu: Pengurangan tingkat kemiskinan dan pembangunan sosial, Peningkatan ekonomi yang termasuk Pengikut sertaan Paraguay di pasar dunia. (Lecuona, 2017)

Paraguay telah berhasil mencapai kemajuan yang berarti di makroekonominya dengan melakukan beberapa reformasi ekonomi seperti Undang-Undang Tanggung Jawab Pajak, Target Inflasi dan pembuatan Dewan Penasehat Pajak. Berkat kebijakan tersebut, Paraguay dalam dua tahun terakhir ini telah berhasil memasuki pasar dunia namun akibat jatuhnya harga bahan mentah mengakibatkan pertumbuhannya menurun sebesar 3.1% pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga di pasar internasional untuk produk dasar dan juga kondisi cuaca yang tidak menguntungkan yang mempengaruhi langsung nilai ekspor Paraguay. Diharapkan harga internasional untuk kedelai akan tetap stabil untuk tahun 2016 dan 2017. Dalam hal persaingan, meskipun ada sedikit perbaikan dalam posisi global sesuai World Economic Forum yang terbaru, Paraguay bergerak menuju kinerja yang lebih baik dalam indikator utama seperti pengembangan pasar keuangan, langganan untuk handphone, dan transparansi kebijakan pemerintah.

Paraguay mengikuti peraturan perdagangan regional dan internasional, termasuk ALADI, MERCOSUR dan WTO. Sebagai anggota blok perdagangan MERCOSUR, bersama Brasil, Argentina, Uruguay dan Venezuela, Paraguay memberlakukan Common External Tariff (CET) sebesar rata-rata 11.5 persen dengan rentang 0 s.d. 35 persen ad valorem untuk perdagangan dengan Non-MERCOSUR. Sementara hampir seluruh produk yang diperdagangkan antar sesama anggota MERCOSUR mendapat fasilitas tariff nol persen. Kekuatan utama

industri dan ekspor Paraguay terletak di sektor Pertanian, peternakan, sumber daya listrik, suku cadang mobil, pakaian dan produk dari tekstil. (Indonesia, 2019)

1. Awal Terbentuknya Kebebasan Demokrasi di Paraguay

Pada bulan Mei 1989, Paraguay mengadakan pemilu pertama setelah berakhirnya masa pemerintahan Stroessner. Partai Colorado milik Stroessner masih menguasai kongres dan pemerintahan dikarenakan tidak cukupnya waktu bagi partai-partai oposisi untuk mengorganisir partai mereka. Partai Kolorado juga tetap mengendalikan pengadilan. Meskipun demikian, sebuah konstitusi baru mulai berlaku pada 20 Juni 1992, dan presiden saat itu mengadopsi langkah-langkah demokratis yang baru. Dia menyatakan kebebasan pers, melegalkan semua partai politik, mencabut sejumlah undang-undang represif, meratifikasi perjanjian hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Negara-negara Amerika, dan membebaskan tahanan politik negara yang tersisa.

Meskipun kebebasan demokratis ini muncul, angkatan bersenjata tetap menjadi kekuatan utama di Paraguay. Panglima Angkatan Darat Jenderal Lino Oviedo muncul sebagai tokoh utama. Dia merekayasa pemilihan Juan Carlos Wasmosy sebagai kandidat Partai Colorado dalam pemilihan presiden 1993. Wasmosy memenangkan pemilihan dan menjadi presiden yang merupakan seorang warga sipil pertama di Paraguay sejak tahun 1954. Oviedo dan Wasmosy kemudian jatuh, menyebabkan pemberontakan pada April 1996. Oviedo pensiun dari dinas aktif dan muncul kembali sebagai calon utama Partai Colorado dalam pemilihan presiden tahun 1998. Calon wakil presiden Oviedo, Raúl Cubas Grau, menggantikan Oviedo sebagai kandidat partai dan memenangkan kursi kepresidenan untuk Partai Colorado

dengan kemungkinan menang yang tinggi. (Lambert & Nickson, 2012)

Pada bulan Agustus 1998, Presiden Cubas membebaskan Oviedo dari penjara dan menolak mengembalikan Oviedo bahkan setelah Mahkamah Agung memutuskan tindakan Cubas tidak konstitusional. Kebuntuan politik dipecahkan setelah pembunuhan Wakil Presiden Luís María Argaña, pada 23 Maret 1999. Khawatir akan intervensi militer, ribuan demonstran mahasiswa memprotes di luar gedung Kongres Nasional di Asuncion, menyerukan penangkapan Oviedo, yang secara luas diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Para pendukung Oviedo menembaki para demonstran, menewaskan delapan dan melukai banyak orang. Presiden Cubas mengundurkan diri dan diasingkan ke Brasil; Sementara itu, Oviedo melarikan diri ke Argentina.

Pada akhir Maret 1999, Luis González Macchi, mantan kepala Senat, dilantik sebagai presiden untuk memimpin Paraguay, yang terdiri dari anggota ketiga partai politik utama. Di bawah tekanan eksternal yang kuat dari Amerika Serikat dan Dana Moneter Internasional, pemerintahan yang baru ini mengumumkan komitmennya untuk mereformasi layanan sipil, untuk memprivatisasi industri, dan untuk mengamanatkan kontrol sipil yang lebih besar atas angkatan bersenjata Paraguay.

2. Dinamika Politik Paraguay pada Abad ke-21

Setelah satu dekade menalami stagnasi, ekonomi Paraguay bangkit kembali, didorong oleh pertumbuhan cepat dalam produksi kedelai. Paraguay adalah salah satu pengeksport kedelai terbesar di dunia pada awal abad ke-21. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi yang cepat, tingkat pengangguran dan kejahatan tetap tinggi karena pemerintah gagal mengatasi kebutuhan mendesak untuk mereformasi tanah dan industrialisasi. (OECD, n.d.)

Pada bulan April 2003, kandidat Partai Colorado Nicanor Duarte Frutos memenangkan pemilihan presiden, dia berjanji untuk memberantas korupsi di partainya dan di negaranya. Selama masa kepresidenannya, Duarte memecat enam hakim dari Mahkamah Agung yang diduga melakukan korupsi, memperkenalkan reformasi pajak, dan menjalankan kebijakan ekonomi makro yang efisien. (Nolte, 2013)

Dalam pemilihan presiden 2008, mantan uskup Fernando Lugo dari koalisi Aliansi Patriotik untuk Perubahan kiri-tengah (Alianza Patriótica para el Cambio; APC) mengalahkan Blanca Ovelar dari Partai Colorado, yang dengan kejadian ini menghentikan pemerintahan Partai Coloradi setelah 62 tahun memimpin Paraguay.

Pada bulan April 2009, Lugo dan Presiden Bolivia. Evo Morales menandatangani perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan di wilayah Chaco yang menyebabkan Perang Chaco pada 1930-an. Mereka menyalahkan intervensi asing karena memicu perang.

Upaya Lugo untuk memperkenalkan redistribusi tanah ditolak oleh peternak dan pemilik tanah serta oleh Partai Colorado. 17 orang terbunuh ketika para petani bentrok dengan polisi yang bertugas untuk mengusir mereka di Paraguay timur. Lugo dikritik mengenai kejadian ini dan ia pun dipidana. Awalnya Lugo menyetujui pemecatannya, tetapi dalam beberapa hari ia meminta untuk membatalkan pemecatannya tersebut. Sejumlah negara tetangga Paraguay juga mempertanyakan legalitas pemindahan Lugo, termasuk Argentina, Brasil, dan Uruguay. Selain itu, baik UNASUR dan Mercosur menanggukkan Paraguay. (Nolte, 2013)

Pada bulan April 2013, Partai Colorado kembali mendapatkan status kepresidenannya ketika pengusaha

dan politikus, Horacio Cartes, mengalahkan Efraín Alegre dari Partai Liberal dengan meraih sekitar 46 persen suara dibanding 37 persen untuk Alegre.

Pada akhir 2015 Cartes telah melanggar janji untuk memberantas korupsi endemik dalam administrasi publik dengan menunjuk individu ke posisi senior hanya berdasarkan prestasi. Horacio Cartes secara bertahap menuju ke sistem pemerintahan tradisional dari Partai Colorado.

Terlepas dari tingkat fluktuasi yang tinggi, PDB Paraguay meningkat rata-rata sekitar 5 persen dari 2008 hingga 2017, diuntungkan dari ekspor daging sapi dan kedelai serta dari keberhasilan pencarian investasi asing oleh Cartes. Cartes berusaha untuk mengubah konstitusi yang memperbolehkannya mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Untuk mencegah munculnya Stroessner yang lain, konstitusi negara 1992 membatasi presiden Paraguay untuk hanya boleh menjabat selama satu periode. Setelah pemungutan suara Senat untuk mengubah konstitusi gagal pada Agustus 2016, anggota Partai Colorado mulai mengadakan sesi "alternatif" yang hanya dihadiri oleh beberapa anggota oposisi. Pada 31 Maret 2018, 25 Senator memilih untuk mengubah konstitusi yang memungkinkan Cartes mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Namun pihak oposisi menyatakan bahwa pemungutan suara oleh Senat "alternatif" adalah ilegal, dengan alasan bahwa persetujuan oleh majelis konstituante diperlukan untuk mengubah konstitusi yang mengatur batas masa jabatan presiden. Pada pertengahan April 2018, Cartes mengumumkan bahwa ia tidak ingin untuk mencalonkan diri kembali.

Partai Colorado memilih Mario Abdo Benítez, mantan senator yang berusia 46 tahun, sebagai kandidatnya dalam pemilihan presiden pada bulan April 2018. Mario Abdo Benitez, yang ayahnya adalah

sekretaris pribadi Stroessner, berbagi pandangan pro-bisnis, konservatif secara sosial dengan pesaing utamanya, Alegre, yang mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Liberal. Prediksi jelang pemilu membuktikan bahwa Mario Abdo Benitez unggul 20 persen atas Alegre, tetapi hasil akhirnya terbukti lebih dekat, ketika Mario Abdo Benitez merebut kursi kepresidenan dengan mengambil lebih dari 46 persen suara dibanding 43 persen untuk Alegre. Sisanya dibagi di antara delapan kandidat lainnya. (Election Watch, 2018)

B. Politik Luar Negeri Paraguay

Paraguay mempertahankan hubungan diplomatik yang erat dengan sesama anggota *Common Market of the South* (Mercado Común del Sur - Mercosur) pada bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Paraguay dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang lebih besar. Paraguay juga sering terlibat dalam konflik, seperti perang melawan Brasil, Argentina, dan Uruguay (1864–70). Dan juga perang melawan Bolivia (1932–35).

Amerika Serikat membantu penggulingan pemimpin otoriter Stroessner dan menyelesaikan krisis yang dihasilkan dari pemilihan umum Paraguay pada tahun 1998. Ikatan ekonomi antara Amerika Serikat dan Paraguay telah pulih kembali setelah bertahun-tahun menurun selama keruntuhan ekonomi Paraguay. Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memberikan beberapa bantuan ekonomi ke Paraguay dan menghentikan praktek pencucian uang di wilayah tersebut.

Paraguay adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paraguay juga merupakan anggota *Common Market of the South* (Mercado Común del Sur-Mercosur), Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol),

Organisasi Perburuhan Internasional, Dana Moneter Internasional, Sistem Ekonomi Amerika Latin, Asosiasi Integrasi Amerika Latin, Organisasi Amerika Negara, Grup Rio, dan Bank Dunia.

Paraguay memiliki peran dalam sejumlah perjanjian penting, termasuk perjanjian internasional tentang senjata biologis, senjata kimia, hak cipta, hak asasi manusia, kekayaan intelektual, non-proliferasi senjata nuklir, pengungsi, dan penyiksaan. Di bidang lingkungan, Paraguay juga merupakan bagian dari perjanjian berikut: Keanekaragaman Hayati, Perubahan Iklim (termasuk Protokol Kyoto), Desertifikasi, Spesies Terancam Punah, Limbah Berbahaya, Hukum Laut, Perlindungan Lapisan Ozon, dan Lahan Basah.

Hubungan Uni Eropa-Paraguay didasarkan pada *Framework Co-operation Agreement* pada tahun 1991 dan *EU-MERCOSUR Framework Agreement on Cooperation* pada tahun 1995. Uni Eropa mengadopsi strategi European Community-Paraguay pada Agustus 2002, yang menyediakan strategi multi-tahun untuk tahun 2001-2006 dengan alokasi indikatif bantuan sebesar USD 69,25 juta. Prioritas yang disepakati oleh UE dan Paraguay adalah modernisasi negara, pengembangan produktif, daya saing dan investasi, dan pengurangan kemiskinan. Pada bulan Mei 2002, delegasi Komisi Eropa telah beroperasi di Asunción. Selain itu, Komite Bersama Masyarakat Eropa-Paraguay keenam diadakan di Asunción pada bulan November 2005.

Sebagai anggota MERCOSUR, Paraguay telah mengadopsi kebijakan integrasi regional aktif dengan Brasil, Argentina, dan Uruguay. Dewan Umum MERCOSUR pada 18 Februari 2002 memutuskan untuk membuat pengadilan hukum permanen di Asunción. Sebagai anggota MERCOSUR, Paraguay adalah pihak dari negosiasi yang sedang berlangsung untuk perjanjian

asosiasi UE-MERCOSUR. Tujuan utamanya adalah liberalisasi perdagangan barang dan jasa, yang bertujuan perdagangan bebas, sesuai dengan aturan WTO, serta meningkatkan kerja sama dan memperkuat dialog politik. Paraguay juga mendukung integrasi perdagangan regional di Belahan Barat, terutama dengan bernegosiasi untuk membangun wilayah perdagangan bebas di Amerika. Organisasi Internasional.

Anggota parlemen di Paraguay memberikan suara pada Juni 2012 untuk memakzulkan Fernando Lugo, setelah penggusuran penghuni liar yang menyebabkan beberapa orang tewas. Sejalan dengan konstitusi Paraguay, Lugo digantikan oleh Wakil Presiden Franco, yang telah menjadi lawan kuat presiden. Blok perdagangan Amerika Selatan melarang presiden baru Paraguay, Federico Franco, untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak mendatang, menyusul pemecatan mantan presiden Fernando Lugo. Mercosur mengatakan Paraguay tidak akan diizinkan untuk mengambil bagian dalam pertemuannya pada Juni 2012 di Argentina. Sebuah pernyataan Mercosur, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Argentina, menyatakan "kecaman paling energik terhadap pecahnya tatanan demokratis" di Paraguay.

Presiden Venezuela Hugo Chavez mengatakan pemerintahnya akan menghentikan penjualan bahan bakar ke Paraguay. Brasil dan Argentina menarik para diplomat top mereka dari Paraguay, sementara Venezuela, Bolivia, Ekuador dan Kuba mengatakan mereka tidak akan mengakui pemerintahan baru. Terlepas dari kemarahan internasional, penggulingan Lugo di Paraguay dipandang sebagai keberhasilan yang menakjubkan oleh elit AS dan regional. Pengalaman ini akan berfungsi sebagai prototipe untuk upaya masa depan untuk menggulingkan pemimpin progresif di wilayah ini.

1. Politik Luar Negeri di Era Presiden Horacio Cartes

Selain dekat dengan negara-negara di Amerika Selatan, Paraguay juga sangat dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berjasa dalam menyediakan bantuan dan kerjasama bersama Paraguay. Horacio Cartes sebagai Presiden dari Paraguay pada saat itu mengikuti langkah Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besar Paraguay di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Paraguay memindahkan kedutaan besarnya ke Jerusalem pada tanggal 21 Mei 2018.

Horacio Cartes juga mempunyai hubungan dekat dengan Israel. Dia diketahui sangat dekat dengan perdana menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Salah satu Pengiklan kampanye Horacio Cartes pada tahun 2014 adalah Ari Harrow, yang menjabat juga sebagai kepala staf Netanyahu. (Baeza, 2018)

Pada tahun 2016, Presiden Horacio Cartes mendatangi Israel sebagai Presiden Paraguay pertama yang menandatangani *memorandum of understanding* yang membahas tentang Israel akan membantu Paraguay dalam hal pengembangan teknologi. (Chronology: Israel. (2019)., 73(1), , 2019)



Gambar 2.1 Mantan Presiden Paraguay, Horacio Cartes (kiri), bertemu dengan PM Israel, Netanyahu (kanan)

Kedekatan kedua negara ini lah yang memicu Horacio Cartes untuk meminadahkan Kedutaan Besar Paraguay di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mendukung keputusan Gedung Putih mengenai UU Jerusalem Embassy Act tentang letak Kedutaan Besar di Israel.

Keputusan Horacio Cartes ini disetujui oleh Amerika Serikat dan Israel. Dengan kebijakan Horacio Cartes ini, Amerika Serikat dan Israel berharap agar Paraguay dapat lebih dekat dengan Israel maupun AS dan dapat terus bekerja sama dalam berbagai bidang.

2. Politik Luar Negeri di Era Presiden Mario Abdo Benitez

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Paraguay sebelumnya, Horacio Cartes, tidak disetujui oleh Mario. Dalam kampanye nya, Mario mengatakan bahwa Horacio

Cartes tidak berdiskusi terlebih dahulu dengannya mengenai pemindahan Kedutaan Besar Paraguay di Israel. Ia mengatakan bahwa pemindahan Kedutaan Besar ke Jerusalem akan memperlambat usaha untuk menyelesaikan masalah antara Palestina-Israel.

Presiden Mario yang kemudian memindahkan kembali Kedutaan Besar Paraguay di Israel dari Jerusalem kembali lagi ke Tel Aviv langsung mendapat kecaman dari AS dan Israel. Israel langsung bertindak tegas dengan memanggil Duta Besarnya di Paraguay dan menutup Kedutaan Israel di Paraguay. Tindakan Israel ini dianggap berlebihan oleh Paraguay. Paraguay berharap dengan dipindahkannya Kedutaan Besar Paraguay kembali ke Tel Aviv tidak membuat hubungan antara Paraguay-Israel menjadi renggang.

Keputusan Mario Abdo Benitez ini disambut baik dengan Palestina maupun negara-negara timur tengah lainnya. Menteri Luar Negeri Palestina mengucapkan terima kasih kepada Paraguay karena sudah mentaati hukum internasional yang ada. Palestina juga berencana untuk mempererat hubungan kedua negara dengan membuka Kedutaan Besar Palestina di Paraguay. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, memerintahkan kepada Menteri Luar Negerinya untuk segera membuka kedutaan Palestina di Paraguay. Keputusan Mario ini juga membuka kemungkinan bagi Paraguay untuk bekerjasama dengan negara-negara timur tengah yang lain.